



**LAPORAN KINERJA (Lk)**  
**2018**  
**BADAN KESBANGPOL**



## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena hanya dengan Rahmat dan Hidayah Nya, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (BKBP) Kota Jambi, dapat Menyelesaikan Dokumen Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2018, sesuai dengan jadwal yang ditentukan.



Dokumen LKj ini disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

LKj ini disusun sebagai wujud tanggung jawab atas kinerja dan sasaran strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Jambi Tahun 2018, dimana penilaian kinerja disajikan secara kuantitatif. LKj ini berfungsi sebagai transparansi kepada masyarakat dan sebagai alat kendali peningkatan kinerja.

Peningkatan kinerja berdampak pada peningkatan Pembangunan Daerah khususnya Kota Jambi seiring dengan perjalanan reformasi akan selalu menghendaki pemerintahan yang efektif, efisien, produktif, demokratis, bertanggung jawab serta transparan dan responsif. Untuk itu instansi pemerintah termasuk Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota



## BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA JAMBI

Jambi harus bekerja berdasarkan *Visi dan Misi* yang jelas, menggunakan strategi yang tepat serta cara mencapai tujuan dan sasaran yang tepat pula.

Pada LKj Tahun 2018 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Jambi menetapkan 4 indikator. Secara umum target kinerja tercapai, namun ada beberapa target yang tidak tercapai, hal ini disebabkan BKBP bersifat mengkoordinir dan fasilitasi baik instansi atau organisasi.

Setelah dianalisis dan di evaluasi semoga LKj merupakan gambaran dan menjadi acuan budaya kinerja di lingkungan BKBP. Untuk mendukung dalam mewujudkan reformasi birokrasi dan mewujudkan Kota Jambi Bangkit.

Diharapkan dengan tersusunnya LKj ini dapat dijadikan alat pembandingan dalam pelaksanaan kegiatan dan kinerja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik untuk tahun mendatang dengan lebih baik lagi. Namun demikian Kami menyadari bahwa penyusunan ini jauh dari suatu kesempurnaan oleh karena itu kritik dan saran yang konstruktif kami harapkan demi suatu perbaikan yang terus menerus.

### KEPALA BADAN KESBANG DAN POLITIK KOTA JAMBI

**LIPHAN PASARIBU, SH**

Pembina Utama Muda

NIP. 19590912 198002 1 001



**DAFTAR ISI**

Kata Pengantar .....	i
Daftar Isi .....	iii
<b>BAB I</b> <b>PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1.    Gambaran Umum .....	1
1.2.    Tugas dan Fungsi .....	3
1.3.    Isu Strategis.....	4
1.4.    Sistematika Penulisan .....	9
<b>BAB II</b> <b>PERENCANAAN KINERJA</b> .....	<b>10</b>
2.1.    Rencana Strategis .....	10
2.2.    Indikator Kinerja Utama .....	13
2.3.    Perjanjian Kinerja Tahun 2018 .....	13
<b>BAB III</b> <b>AKUNTABILITAS KINERJA</b> .....	<b>15</b>
3.1.    Capaian Indikator Kinerja .....	15
3.2.    Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja .....	16
3.3.    Akuntabilitas Keuangan .....	39
3.4.    Hasil Rivew .....	40
<b>BAB IV</b> <b>PENUTUP</b> .....	<b>41</b>



**BAB I**

**PENDAHULUAN**

**1.1. Gambaran Umum**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Jambi (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2008 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Jambi (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2013 Nomor 3) dan dirubah lagi dengan Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Satuan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2016 Nomor 14), maka, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintah daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang ideologi, kesatuan bangsa dan politik serta tugas pembantuan. meliputi: Hubungan antar lembaga dalam proses penyelenggaraan pemilu, persatuan dan kesatuan bangsa, strategi daerah sesuai dengan ideologi Pancasila, membantu pelayanan perlindungan masyarakat terhadap bencana dan ketatausahaan serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Daerah sesuai dengan bidang tugasnya.

Berdasarkan Peraturan Walikota Jambi Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Fungsi Badan, Sekretaris, Bidang dan Rincian Tugas Sub Bagian serta Tata Kerja pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Jambi Pada Badan



## BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA JAMBI

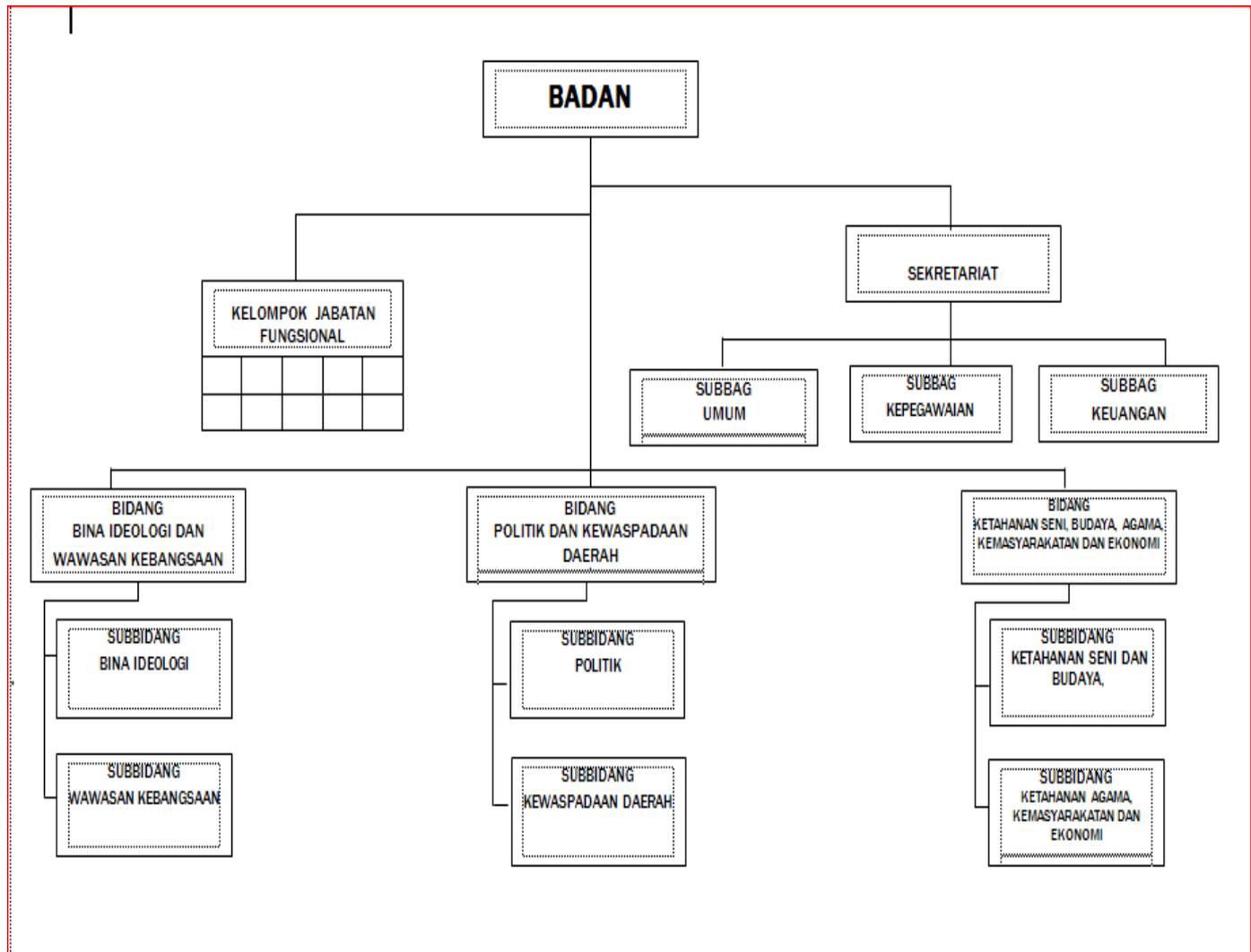
Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Jambi, susunan organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Jambi terdiri dari:

1. Kepala Badan;
2. Sekretariat, membawahi:
  - a. Sub Bagian Umum
  - b. Sub Bagian Keuangan
  - c. Sub Bagian Kepegawaian
3. Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan, membawahi:
  - a. Sub Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan
  - b. Sub Bidang Wawasan Kebangsaan
4. Bidang Politik dan Kewaspadaan Daerah, membawahi:
  - a. Sub Bidang Politik
  - b. Sub Bidang Kewaspadaan Daerah
5. Bidang Ketahanan Seni Budaya, Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi, membawahi:
  - a. Sub Bidang Ketahanan Seni Budaya dan Agama
  - b. Sub Bidang Ketahanan Kemasyarakatan dan Ekonomi
6. Kelompok Jabatan Fungsional

Secara lengkap bagan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Jambi dapat dilihat dalam Gambar

Gambar 2.1.

Struktur Organisasi Badan Kesbangpol Kota Jambi



## 1.2. Tugas dan Fungsi

Sesuai dengan Peraturan Walikota Jambi Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Fungsi Badan, Sekretariat, Bidang dan Rincian Tugas Sub Bagian, Sub Bidang Serta Tata Kerja Pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Jambi, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Jambi mempunyai fungsi sebagai berikut:



- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
- b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah dibidang kesatuan bangsa dan politik;
- c. Pelaksanaan pembinaan bidang kesatuan bangsa dan politik;
- d. Penyelenggaraan bina ideologi, wawasan kebangsaan, politik, kewaspadaan daerah, ketahanan seni budaya, agama, dan kemasyarakatan serta ekonomi;
- e. Pemberian pertimbangan dalam penyelenggaraan bidang kesatuan bangsa dan politik;
- f. Pengkoordinasian hubungan kerjasama dengan instansi Pemerintah dan pihak terkait lainnya dibidang kesatuan bangsa dan politik;
- g. Pemberian penghargaan dibidang kesatuan bangsa dan politik;
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **1.3. Isu Strategis**

Sesuai dengan UU Republik Indonesia nomor 16 Tahun 2017 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas UU nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan menjadi UU pada bab 1 pasal 3 Ormas dapat berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum. Ormas berbadan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (I) huruf a dapat berbentuk perkumpulan atau yayasan. Pada pasal 4 Ormas tidak berbadan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (I) huruf b dapat memiliki struktur kepengurusan berjenjang atau tidak berjenjang. Pada Bab II pasal 5 Ormas berbadan hukum dinyatakan terdaftar setelah



mendapatkan pengesahan badan hukum dan materi yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia. Pasal 6 Ormas tidak berbadan hukum dinyatakan terdaftar setelah mendapatkan SKT (Surat Keterangan Terdaftar). Selanjutnya pada pasal disebutkan bahwa ormas yang telah mendapatkan pengesahan badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) Pengurus Ormas melaporkan keberadaan kepengurusannya di daerah kepada Pemerintah daerah setempat dengan melampirkan surat keputusan pengesahan status badan hukum dan susunan kepengurusan di daerah.

Sesuai dengan kondisi diatas pada saat ini masa banyak ormas yang belum memberitahukan keadaannya maka peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Jambi dalam memberikan pembinaan dan penertiban terhadap seluruh ormas sangatlah penting, agar tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945. Bagi ormas yang melakukan tindakan yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945 dapat dijatuhi sanksi pidana/hukum sesuai dengan ketentuan pidana yang berlaku.

Tahun 2018 tercatat ada 178 orkemas dan LSM dalam wilayah Kota Jambi. Pelayanan pendaftaran ormas berhasil menerbitkan SKT (surat keterangan terdaftar) ormas berbadan hukum sebanyak 21 ormas, sebagian lagi melakukan pendaftaran ulang ke Mendagri RI sebanyak 15 ormas. Dalam melakukan pembinaan dan penertiban ormas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik juga turun langsung ke lapangan untuk memantau keberadaan dan aktifitas orkemas.



Permasalahan keagamaan di Kota Jambi Tahun 2018 yang menjadi isu nasional adalah penyegelan 3 gereja diwilayah Kelurahan Kenali Besar Kecamatan Alam Barajo. Hal tersebut terjadi karena ke 3 rumah ibadah tersebut belum mempunyai izin rekomendasi IMB sesuai dengan peraturan bersama Menteri Agama dan Mendagri nomor 9 dan 8 Tahun 2006 pasal 14 ayat 2a dan b. selain itu adanya pemanfaatan gedung bukan rumah ibadah dijadikan tempat ibadah, persoalan-persoalan tersebut sebagian dapat diselesaikan dengan adanya pertemuan Dewan Penasehat FKUB dan Pengurus FKUB dengan meninjau, memantau dan mengkroscek kembali keabsahan kelengkapan dokumen/daftar rumah ibadah untuk pengurus izin rekomendasi IMB rumah ibadah yaitu dengan memberikan fasilitasi sepenuhnya kepengurusan rumah ibadah.

Perkembangan kemajuan ilmu dan teknologi dapat mempengaruhi lingkungan di masyarakat terutama pola perilaku dan akhlak generasi muda perubahan pola pikir dan akhlak yang sangat mudah terprovokasi dan terpengaruh dengan keadaan lingkungan yang kurang baik, mudarnya kecintaan dan kebanggaan terhadap Bangsa dan Tanah Air Indonesia serta menurunnya kultur budaya bangsa dan lenyapnya rasa nasionalisme.

Menurunnya wawasan kebangsaan masyarakat akibat pengaruh globalisasi dan semangat kebangsaan yang ter-erosi terutama dikalangan generasi muda mendorong terjadinya dis-orientasi dan disintegrasi bangsa. Terjadinya krisis multi dimensi ditandai dengan awal munculnya krisis kepercayaan diri dan rasa hormat diri sebagai bangsa. Keprihatinan tentang adanya upaya untuk melarutkan pandangan hidup bangsa kedalam pola pikir yang asing. Konflik



horizontal dan vertikal yang terjadi dalam kehidupan sosial yang memicu lahirnya ancaman disintegrasi bangsa. Pendidikan wawasan kebangsaan belum efektif, terintegrasi, terencana, bertahap dan berkelanjutan di Kota Jambi.

Generasi muda perlu mendapatkan perhatian yang serius agar tidak terjebak dalam kehidupan bebas yang sangat bertentangan dengan kaidah dan norma agama. Maka dari itu perlu adanya pembekalan bagi generasi muda berupa sosialisasi yang bersifat meningkatkan Persatuan dan Kesatuan Bangsa sebagai NKRI. Perlu adanya proses bercirikan konsep wawasan kebangsaan yang berdasar pada 4 pilar kehidupan berbangsa yaitu ; Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika dan NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia).

Semakin maraknya peredaran narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya adalah hal yang sangat penting diperhatikan dan memerlukan penanganan khusus karena dapat membawa dampak negatif bagi generasi muda. Maka salah satu cara untuk mengantisipasi canduan narkoba dan meminimalisir perkembangan narkoba yaitu dengan melakukan kegiatan berupa sosialisasi dan tes urine kepada generasi muda terutama dikalangan pelajar.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Jambi memiliki kewenangan mendukung terwujudnya stabilitas keamanan didaerah dalam upaya pencegahan, penghentian dan pemulihan pasca konflik social. Menyikapi Peraturan Presiden nomor 21 Tahun 2016 tentang bebas visa kunjungan, perlu dilakukan pemantauan terhadap keberadaan orang asing dan tenaga kerja asing untuk mengantisipasi dan mendeteksi hal-hal yang tidak diinginkan.



Dengan beragamnya suku, agama, dan golongan yang ada di Kota Jambi perlu adanya deteksi dini untuk mengantisipasi ancaman terorisme, radikalisme, ekstrim kanan, ekstrim kiri, disintegrasi bangsa, isu sara, aliran sesat, perang antar suku/agama dan masalah-masalah sosial lainnya. Dengan adanya deteksi dini diharapkan berbagai hal tersebut tidak terjadi.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Jambi mempunyai tugas sebagai perwakilan Pemerintah Kota Jambi dalam melaksanakan pemantauan pemilihan kepala daerah yaitu Walikota dan Wakil Walikota Jambi bekerjasama dengan KPU Kota Jambi dan Panwas Kota Jambi serta stakeholder terkait.

Bahwa untuk mengetahui perkembangan situasi politik yang terjadi di wilayah Kota Jambi agar menciptakan stabilitas politik pemerintahan yang kondusif di daerah, perlu melakukan pemantauan, pelaporan dan evaluasi situasi politik secara tertib, terkoordinasi dan berkesinambungan sesuai dengan Permendagri Nomor 61 Tahun 2011. Pemantauan merupakan kegiatan melakukan pengamatan dan observasi terhadap perkembangan politik di daerah yang mempunyai dinamika dalam proses penyelenggaraan kehidupan politik baik itu sebelum Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Jambi maupun Pasca Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Jambi.

Perkembangan situasi Politik yang terjadi di Kota Jambi sangat Kondusif, Aman dan terkendali pada Tahun 2018, walaupun terjadi konflik dalam pelaksanaan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Jambi namun dapat diatasi, sehingga pelaksanaan berjalan dengan lancar sampai tahap pelantikan Walikota dan Wakil Walikota pada tanggal 6 November 2018.

#### **1.4. Sistematika Penulisan**

LKj Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Jambi Tahun 2018 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

**BAB I Pendahuluan**, menguraikan tentang gambaran umum Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Tugas dan Fungsi, dan isu strategis.

**BAB II Perencanaan Kinerja**, menguraikan tentang rencana strategis, indikator kinerja utama (IKU), dan perjanjian kinerja.

**BAB III Akuntabilitas Kinerja**, menguraikan tentang capaian indikator kinerja Utama (IKU); pengukuran, evaluasi dan analisis sasaran; akuntabilitas kinerja dan prestasi.

**BAB IV Penutup**, mengemukakan tinjauan secara umum dengan mengemukakan keberhasilan/kegagalan, permasalahan/kendala yang berkaitan dengan kinerja, dan strategi pemecahan masalah untuk meningkatkan kinerja periode berikutnya.

**BAB II****PERENCANAAN KINERJA****2.1. Rencana Strategis**

Pada RPJMD 2013-2018 Kota Jambi menetapkan visi dan lima misi dengan enam prioritas, dan Badan Kesbangpol Kota Jambi mengemban salah satu amanat dari 1 misi, yaitu:

**Misi 5 : *Meningkatkan Kesejahteraan Sosial, Keamanan dan Kenyamanan Masyarakat, Dalam Bingkai Kearifan Lokal***, dengan prioritas 2, dimana salah satu sasaran didalamnya adalah Terwujudnya Peningkatan Kerukunan Kehidupan Beragama.

Untuk mendukung misi tersebut maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Jambi menetapkan Rencana Strategis, sebagai berikut:

Visi : ***“TERWUJUDNYA PERSATUAN DAN KESATUAN MASYARAKAT KOTA JAMBI MELALUI STABILITAS POLITIK DAN PEMBINAAN MASYARAKAT YANG BERAKHLAK”***.

Ini mengandung makna mewujudkan makin kokoh dan kuatnya rasa persatuan dan kesatuann bangsa, khususnya di Wilayah Kota Jambi, sehingga penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan dapat berjalan secara transparan dan akuntabilitas serta terciptanya stabilitas politik yang kondusif dalam Kota Jambi.

Sejalan dengan Visi tersebut diatas, maka Misi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Jambi, adalah :

1. Meningkatkan rasa aman, tertib dan berbudaya dalam masyarakat.

2. Meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
3. Meningkatkan pendidikan politik, pemberdayaan Ormas dan Parpol dalam mewujudkan masyarakat yang demokratis.
4. Meningkatkan peran fasilitasi dan koordinasi dalam bidang ketahanan seni budaya, agama, kemasyarakatan dan ekonomi.
5. Meningkatkan rasa cinta tanah air pada masyarakat.

<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>
Meningkatkan keamanan, kenyamanan lingkungan, persatuan dan kesatuan dan rasa cinta terhadap tanah air NKRI	Peningkatan keamanan, kenyamanan lingkungan, persatuan dan kesatuan dan rasa cinta terhadap tanah air NKRI	Meningkatnya keamanan dan kenyamanan lingkungan di Kota Jambi
Meningkatkan partisipasi dan keterlibatan masyarakat dalam pembangunan dan demokrasi	Peningkatan partisipasi dan keterlibatan masyarakat dalam pembangunan dan demokrasi	Peran Orkemas dan Parpol dalam pembangunan daerah dan demokrasi

Tabel 2.1.1.

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	KEADAA N 2016	SATUA N	TARGET	
						2017	2018
1.Meningkatkan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Persentase penurunan masalah keagamaan	1.Terselesaikannya masalah agama	1.Persentase penyelesaian masalah keagamaan	100	%	100	100
2.Meningkatkan persatuan dan kesatuan dan rasa cinta terhadap tanah air NKRI	Persentase penurunan angka konflik	2. Menurunnya angka konflik yang disebabkan oleh suku, ras dan antar golongan/etnis	2. Persentase jumlah menurunnya angka konflik yang disebabkan suku, ras dan antar golongan/etnis	100	%	100	100
3.Meningkatkan partisipasi dan keterlibatan masyarakat dalam pembangunan	Persentase partisipasi dan keterlibatan masyarakat dalam pembangunan melalui Orkemas	3. Meningkatnya organisasi kemasyarakatan yang aktif	3.Persentase organisasi kemasyarakatan yang aktif	5	%	5	5
4.Meningkatkan partisipasi dan keterlibatan masyarakat dalam berdemokrasi	Persentase penurunan jumlah gangguan keamanan/ke tertiban masyarakat	4. Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang politik terkait dengan kondisi daerah	4. Kondisi daerah yang kondusif	100	%	100	100

Tabel 2.1.2.

Untuk melaksanakan rencana strategis, Badan Kesbangpol memiliki program dan anggaran pada tahun 2018 sebagai berikut:

1. Program Pembinaan, Pemberdayaan dan Fasilitasi bagi Orkemas dan Parpol:



## BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA JAMBI

Rp.509.790.000,-

2. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan:

Rp.1.152.378.000,-

3. Program Non Urusan:

Rp.1.131.352.000,-

### 2.2. Indikator Kinerja Utama

INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET
1. Persentase penyelesaian masalah keagamaan	%	100
2. Persentase jumlah menurunnya angka konflik yang disebabkan suku, ras dan antar golongan/etnis	%	100
3. Persentase organisasi kemasyarakatan yang aktif	%	5
4. Kondisi daerah yang kondusif	%	100

### 2.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2018

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1. terselesaikannya masalah keagamaan	1.Persentase penyelesaian masalah keagamaan	%	100
2. Menurunnya angka konflik yang disebabkan suku, ras dan antar golongan/etnis	2. Persentase jumlah menurunnya angka konflik yang disebabkan suku, ras dan antar golongan/etnis	%	100
3. Meningkatnya organisasi kemasyarakatan yang aktif	3.Persentase organisasi kemasyarakatan yang aktif	%	5
4. Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang	4. Kondisi daerah yang kondusif	%	100



## BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA JAMBI

politik terkait dengan kondisi daerah			
--	--	--	--

**BAB III****AKUNTABILITAS KINERJA****3.1. Capaian Indikator Kinerja**

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1. Terselesaikannya masalah keagamaan	1. Persentase penyelesaian masalah keagamaan	%	100	100	100
2. Menurunnya angka konflik yang disebabkan suku, ras dan antar golongan/etnis	2. Persentase jumlah menurunnya angka konflik yang disebabkan suku, ras dan antar golongan/etnis	%	100	100	100
3. Meningkatnya organisasi kemasyarakatan yang aktif	3. Persentase organisasi kemasyarakatan yang aktif	%	5	8,43	59,31
4. Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang politik terkait dengan kondisi daerah	4. Kondisi daerah yang kondusif	%	100	100	100

### **3.2. Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja**

#### **Sasaran 1. Terelesaikannya masalah keagamaan**

##### **A. Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)**

Untuk menyelesaikan masalah keagamaan Badan Kesatuan Bangsa dan politik membentuk Tim Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) yang dibentuk berdasarkan :

- a. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 9 dan 8 pada Tahun 2006
- b. SK Walikota Jambi Nomor 136 Tahun 2018 tentang Pembentukan Pengurus Dewan Penasehat dan Pengurus Forum Kerukunan Umat Beragama Kota Jambi Tahun 2018 masa bhakti 2008-2021
- c. SK Kaban Kesbangpol Kota Jambi Nomor 34 Tahun 2018 tentang Pemberian Honorarium Dewan Penasehat dan Pengurus Forum Kerukunan Umat Beragama Kota Jambi

Ada beberapa kegiatan yang telah dilakukan oleh Forum Kerukunan Umat Beragama agar kinerja Badan Kesbangpol dapat dicapai, antara lain:

##### **a. Pemantauan Rumah Ibadah dalam Kota Jambi**

Pengurus FKUB (Forum Kerukunan Umat Beragama) Kota Jambi pada Tahun 2018 telah turun ke lapangan dalam rangka meninjau, memantau dan mengkroscek kembali keabsahan kelengkapan dokumen/data rumah ibadah yang berdiri sebelum Tahun 2006 , masalah perizinan IMB Rumah Ibadah, Tanah/lokasi yg akan dibangun rumah ibadah yaitu :

1. 3 Rumah Ibadah di wilayah Kecamatan Alam Barajo
2. 2 Rumah Ibadah di wilayah Kecamatan Paal Merah



3. 1 Rumah Ibadah di wilayah Kecamatan Kota Baru
4. 1 Rumah Ibadah di wilayah Kecamatan Telanaipura
5. 2 Rumah Ibadah di wilayah Kecamatan Jambi Timur

Dari hasil peninjauan ke lapangan yang dilakukan oleh FKUB, lalu diadakan rapat koordinasi oleh Dewan dan Pengurus FKUB (Forum Kerukunan Umat Beragama) Kota Jambi membahas perizinan mendirikan rumah ibadah dan beberapa masalah keagamaan sebanyak 6 kali rapat di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Jambi yaitu pada :

1. Tanggal 8 Februari 2018
2. Tanggal 08 Mei 2018
3. Tanggal 08 Mei 2018 pukul 14.00 WIB
4. Tanggal 06 Juli 2018
5. Tanggal 08 Agustus 2018
6. Tanggal 14 September 2018

Dari hasil rapat yang telah dilakukan oleh Forum Kerukunan Umat Beragam dengan berkoordinasi dengan Pemerintah Kota Jambi maka Forum Kerukunan Umat Beragama dengan Pemerintah bersedia akan memfasilitasi sepenuhnya pengurusan pembuatan rekomendasi IMB bagi Rumah Ibadah yang berdiri sebelum tahun 2006.

Dari kinerja yang dilakukan oleh Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) perihal menindaklanjuti dari peninjauan lapangan rumah ibadah telah diterbitkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sebagai berikut :

- 46 untuk Masjid dan Langkar
- 5 untuk Gereja

- 1 untuk Klenteng

Tahun 2018 terdapat masalah keagamaan terkait Perizinan Rumah Ibadah di Kota Jambi sebanyak 3 masalah dan ke 3 masalah tersebut dapat terselesaikan melalui mediasi dan musyawarah antara pihak – pihak terkait bersama FKUB dan Pemerintah Kota Jambi. Sebagaimana yang terlihat dalam table setiap tahun permasalahan keagamaan dapat terselesaikan dengan baik.

TAHUN	JUMLAH MASALAH	JUMLAH MASALAH YANG SELESAI	%	PERBANDINGAN DENGAN KOTA LAIN
2014	1	1	100	n/a
2015	3	3	100	n/a
2016	6	6	100	n/a
2017	1	1	100	n/a
2018	3	3	100	n/a

Dengan adanya Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), merupakan forum yang beranggotakan dari beberapa unsur agama, antara lain: agama Islam, Kristen, Kristen Protestan, Hindu, Budha dan Konghucu. Sangat penting dalam menyelesaikan masalah-masalah keagamaan.



**b. Dialog Pembinaan Umat Beragama**

- 1) Sosialisasi Dialog Pembinaan Umat Beragama berlangsung selama 1 (satu) hari yaitu pada tanggal 15 November 2018 bertempat di Aula Bappeda Kota Jambi. Kegiatan tersebut dibuka secara resmi oleh Asisten Pemerintahan Setda Kota Jambi (mewakili Walikota Jambi) peserta sebanyak 50 orang utusan dari Para Ketua RT dari Kec. Jelutung dan Kec.Paal Merah dengan Narasumbernya dari Ditjen Polpum Kemendagri Jakarta dan Ketua Pengurus FKUB Kota Jambi.
- 2) Kesimpulan Sosialisasi Dialog pembinaan Umat Beragama
  - a) Kegiatan Dialog Pembinaan Umat Beragama Tahun 2018 telah terlaksana dengan baik, lancar dan aman
  - b) Peserta dialog mendapatkan pembelajaran:
    - Dengan adanya toleransi dalam keberagaman beragama yang ada di Kota Jambi, diharapkan dapat terciptanya suasana kehidupan keagamaan yang kondusif bagi pemahaman, penghayatan dan pengamalan ajaran agama dan tumbuh rasa saling pengertian, partisipasi serta kerjasama umat beragama.
    - Cara pengurusan penerbitan IMB pendirian rumah ibadah. Dari FKUB Kota Jambi sebagai salah satu persyaratan pengurusan IMB ke DPMPTSP Kota Jambi.

**B. Pengawasan Aliran Kepercayaan masyarakat (PAKEM)**

1. Tim PAKEM Kota Jambi terbentuk berdasarkan :
  - a) Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor KEP-004/JA/01/1994 tanggal 15 Januari 1994 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat;
  - b) Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Jambi Nomor Kep-64/N.5/Dsp.5.10/05/2005 tanggal 16 Mei 2005 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pengawasan Aliran Kepercayaan Kota Jambi.
  - c) SK Walikota Jambi Nomor 126 Tahun 2018, tanggal 12 Februari 2018 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat Kota Jambi Tahun 2018, SK. Kaban Kesbangpol Kota Jambi Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pemberian Honorarium Tim Koordinasi Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat Kota Jambi Tahun 2018
2. Kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Tim PAKEM Kota Jambi selama Tahun 2018 yaitu :

Pada Tahun 2018 telah melaksanakan 3 kali rapat rutin sebagai berikut:

No	Materi Rapat	Waktu Rapat		
		Hari	Tanggal	Jam
1	1. Masalah merubah fungsi bangunan Masjid menjadi Balai Pertemuan atau Bangunan serba guna 2. Laporan Hasil Evaluasi Pengawasan/ Pemantauan Camat di Wilayah kerjanya	Rabu	25 April 2018	09.00 WIB

2	1. Laporan Hasil Evaluasi Pengawasan/ Pemantauan Camat di Wilayah kerjanya. 2. dll.	Selasa	07 Agustus 2018	08.30 WIB
3	Monitoring Aliran Kepercayaan di Wilayah Hukum Kota Jambi”	Kamis	11 Oktober 2018	09.00 WIB

Tim PAKEM Kota Jambi sampai dengan Tahun 2018 ini sudah melaksanakan 3 kali rapat rutin , rapat yang dilakukan membahas aliran kepercayaan yang berkembang di Kota Jambi. Diantaranya berkembangnya Aliran Kepercayaan Masyarakat Indonesia (JAI), Namun Tim PAKEM dan Pemerintah Kota Jambi telah berhasil menyelesaikan permasalahan tersebut.



**Sasaran 2.** Menurunnya angka konflik yang disebabkan suku, ras dan antar golongan/etnis

Sepanjang tahun 2018 hampir tidak ditemukan di Kota Jambi konflik di masyarakat baik yang disebabkan oleh unsur SARA atau unsur lainnya, walaupun ada yang tidak terpantau oleh Badan Kesbangpol kemungkinan tidak sampai menimbulkan kondisi yang mengkhawatirkan. Kondisi selama tahun 2018 di Kota Jambi sangatlah kondusif. Jadi dapat dikatakan bahwa

angka konflik yang disebabkan oleh unsur SARA atau unsur lainnya tidak terdapat di Kota Jambi di tahun 2018.

TAHUN	JUMLAH KONFLIK	JUMLAH KONFLIK YANG DIATASI	%	PERBANDINGAN DENGAN KOTA LAIN
2015	0	0	100	n/a
2016	0	0	100	n/a
2017	0	0	100	n/a
2018	1	1	100	n/a

Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan diberikan Tugas dan Tanggung Jawab melaksanakan **Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan.**

Dari program tersebut Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan melaksanakan sebagian kegiatan antara lain :

A. Kegiatan Pembinaan Ideologi dan Wawasan Kebangsaan, kegiatan ini dilaksanakan dalam sub kegiatan sebagai berikut :

1. Kegiatan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK)

Selama tahun 2018 Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) telah melaksanakan beberapa kegiatan, baik itu berupa silaturahmi kebangsaan Tingkat Kota Jambi maupun berupa rapat penguatan koordinasi antar Dewan dan Pengurus Pembauran Kebangsaan guna untuk meningkatkan kinerjanya. Beberapa kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai sasaran antara lain :

1.1. Rapat antara Dewan dan Pengurus Forum Pembauran Kebangsaan Tingkat Kota Jambi dan Tim PPWK Tahun 2018

yang dilaksanakan pada 25 Mei 2018 bertempat di Ruang Aula Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Jambi dengan materi membuat komitmen bersama antar tokoh agama, tokoh adat, tokoh budaya, tokoh pendidik, tokoh usahawan, tokoh pemuda pandawa bangsa di Kota Jambi.

- 1.2. Rapat antara Dewan dan Pengurus Forum Pembauran Kebangsaan Tingkat Kota Jambi dan Tim PPWK Tahun 2018 dengan materi Pembentukan Dewan Pembina Forum Pemuda Pandawa Bangsa Kota Jambi.
- 1.3. Rapat antara Dewan dan Pengurus Forum Pembauran Kebangsaan Tingkat Kota Jambi dan Tim PPWK Tahun 2018 dengan materi Pembentukan Dewan Pembina dan Forum Pemuda Pandawa Bangsa Kota Jambi.
- 1.4. Rapat antara Dewan dan Pengurus Forum Pembauran Kebangsaan Tingkat Kota Jambi dan Tim PPWK Tahun 2018 dengan materi Pembentukan Forum Pemuda Pandawa Bangsa Kota Jambi.
- 1.5. Kegiatan Silaturahmi Kebangsaan Tingkat Kota Jambi Tahun 2018 dilaksanakan Pada 27 September 2018 oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Jambi. Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Asisten Administrasi Umum Sedta Kota Jambi.



- 1.6. Rapat Koordinasi dengan Instansi terkait dalam rangka monitoring dan evaluasi kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2018 yang dilaksanakan pada tanggal 22 November 2018



## 2. Kegiatan Pencegahan dan Pemberantasan Narkoba

Badan Kesbangpol Kota Jambi telah melaksanakan beberapa kegiatan Pencegahan dan Pemberantasan Narkoba. Beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan antara lain :

- 2.1. Tim Pencegahan dan Pemberantasan Narkoba telah melaksanakan rapat pada tanggal 31 Januari 2018 bertempat di ruang aula Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Jambi membahas tentang persiapan untuk tes urine narkoba.
- 2.2. Tim Pencegahan dan Pemberantasan Narkoba telah melaksanakan rapat pada tanggal 25 April 2018 bertempat di ruang aula Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Jambi membahas tentang persiapan untuk tes urine narkoba.
- 2.3. Tim Pencegahan dan Pemberantasan Narkoba telah melaksanakan tes urine bagi siswa/i SMA pada tanggal 06 Maret 2018 bertempat di ruang aula satpol PP Kota Jambi.



- 2.4. Pada tanggal 04 September 2018 telah dilaksanakan peserta sosialisasi pencegahan dan penyalahgunaan narkoba Kota Jambi tahun 2018 bertempat di ruang aula BKPSDM Kota Jambi dengan peserta 100 orang terdiri dari :
- a) Utusan dari Perguruan Tinggi 10 orang Mahasiswa
  - b) Utusan dari SMA 20 orang Siswa
  - c) Utusan dari Ormas / Pemuda Pancasila 10 orang
  - d) Utusan dari KNPI 10 orang
  - e) Utusan dari Karang Taruna Kelurahan 5 orang
  - f) Utusan dari Tokoh Agama 5 orang
  - g) Utusan dari Tokoh Masyarakat 10 orang
  - h) Utusan dari Badan Kontak Majelis Taklim (BKMT) 20 orang
  - i) Utusan dari PKK Kecamatan / Kelurahan 10 orang
- 2.5. Pada tanggal 19 Oktober 2018 bertempat di ruang aula Badan Kesbangpol Kota Jambi telah dilaksanakan rapat Tim Pencegahan dan Pemberantasan Narkoba membahas tentang rencana pelaksanaan tes urine setelah upacara sumpah pemuda tanggal 29 Oktober 2018.
- 2.6. Tim Pencegahan dan Pemberantasan Narkoba telah melaksanakan tes urine bagi siswa/i SMP pada tanggal 29 Oktober 2018 bertempat di ruang aula satpol PP Kota Jambi.
- 2.7. Pada tanggal 21 November 2018 Tim Pencegahan dan Penanggulangan Narkoba melaksanakan rapat evaluasi kegiatan pencegahan dan penanggulangan narkoba.



### 3. Kegiatan Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan

Tim Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan telah melaksanakan kegiatan pada tahun 2018 antara lain :

- 3.1. Pada tanggal 16 dan 17 Juli 2018 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik telah melaksanakan Kegiatan Pendidikan Wawasan Kebangsaan dengan Tema “Melalui Kegiatan Sosialisasi Pendidikan Karakter Berwawasan Kebangsaan Tahun 2018 kita wujudkan Pemuda yang Pancasila, Berbudaya dan Berwawasan Kebangsaan”. Acara Sosialisasi dibuka secara resmi oleh Staf Ahli Walikota Jambi Bidang Hukum dan Politik Setda Kota Jambi diikuti oleh 200 orang peserta terdiri dari ; utusan pemuda lintas agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, organisasi kemasyarakatan/LSM dan perguruan tinggi, dengan narasumber oleh Bapak Hartono, SH kasubdit karakter dan wawasan kebangsaan dengan materi “pendidikan karakter berwawasan kebangsaan” dan pemuda yang pancasilais berbudaya dan berwawasan kebangsaan.
- 3.2. Pada tanggal 12 Oktober 2018 bertempat di aula Badan Kesbangpol Kota Jambi, telah melaksanakan rapat tim Pusat

Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PPWK) membahas tentang pelaksanaan kegiatan Sosialisasi Wawasan Kebangsaan ke Sekolah.

- 3.3. Pada tanggal 18 Oktober 2018 bertempat di aula Badan Kesbangpol Kota Jambi, telah melaksanakan rapat tim Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PPWK) membahas tentang pemantapan pelaksanaan sosialisasi pendidikan wawasan kebangsaan bagi siswa/i Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri maupun Swasta se-Kota Jambi.



#### B. Kegiatan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA)

Sepanjang tahun 2018 Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA) telah melaksanakan beberapa kegiatan sebagai berikut :

1. Pada tanggal 23 Januari 2018 bertempat di ruang pola kantor Walikota dilaksanakan rapat forum koordinasi pimpinan daerah (forkompimda) dalam rangka persiapan pilkada kota Jambi tahun 2018, yang dihadiri oleh unsur Pimpinan Daerah (Walikota, Kapolresta, Dandim 0415 Batanghari, Danden Pom, Kejari, Ketua DPRD dan Dan Yon 142), Staf Ahli Bidang Hukum dan Politik, Staf Ahli Bidang Pembangunan, Kepala Badan Kesbangpol Kota Jambi, Kepala OPD terkait, Ketua dan



Anggota KPU Jambi, Ketua dan anggota Panwaslu Kota Jambi, Kabag Setda dan Camat dan Lurah se-Kota Jambi.

2. Pada tanggal 09 Maret 2018 bertempat di ruang pola kantor walikota dilaksanakan rapat forum koordinasi pimpinan daerah (forkompimda) dalam rangka membahas ; masalah keamanan dan ketertiban dalam Kota Jambi selama sebelum, saat dan setelah Pilkada dan masalah data penduduk dalam penetapan DPT yang dihadiri oleh Dandim 0415 Batanghari, Kapolresta, Kajari, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Camat, Ketua KPU dan Ketua Panwaslu.
3. Pada tanggal 24 Desember 2018 bertempat di Rumah Dinas Walikota Jambi dilaksanakan rapat forum koordinasi pimpinan daerah (forkompimda) dalam rangka persiapan pengamanan dan pemantauan perayaan malam nata, hari natal di Kota Jambi Tahun 2018 dan Tahun Baru 2019, yang dihadiri oleh unsur Pimpinan Daerah (Walikota, Kapolresta, Dandim 0415 Batanghari/Kasdim dan Kepala Kejaksaan Negeri Jambi), Asisten II, Kepala Badan Kesbangpol Kota Jambi, Kasatpol PP, Kabag Humas Setda Kota Jambi, Kabag Umum Setda Kota Jambi, Anggota Tim Forkopimda dan Kepala Sub Bidang Bina Ideologi Badan Kesbangpol Kota Jambi. Selama perayaan malam natal Pemerintah Kota Jambi siap melakukan pengamanan kepada semua masyarakat yang merayakannya. Hal ini dilakukan agar umat kristiani dapat menjalankan ibadahnya dengan tenang dan nyaman.



Beberapa kegiatan yang dilaksanakan dari Bidang politik dalam mencegah timbulnya konflik, antara lain:

Kegiatan Fasilitas, Pemantauan dan Pengendalian Keamanan, kegiatan ini dilaksanakan dalam sub kegiatan sebagai berikut :

- 1) Kegiatan Tim Pemanataan Orang Asing ditujukan untuk mengetahui keberadaan Orang Asing di Kota Jambi dan menyesuaikan antara Dokumen status keberadaan dan realisasi dilapangan kemudian memberikan pengarahan kepada pihak sponsor agar melaksanakan tanggungjawabnya dalam penggunaan tenaga kerja asing, mahasiswa asing, rohaniawan asing dan peneliti asing sesuai dengan Peraturan dan Undang-undang yang berlaku adapun kegiatan Rapat dan Survei Tim Pemantauan Orang Asing dilaksanakan pada :
  - a) Rapat Tim Pemantauan Orang Asing tanggal 15 Maret 2018 bertempat di Aula Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Jambi membahas Koordinasi dan persiapan untuk melakukan Survey kelapangan terhadap Orang Asing dan Tenaga Kerja Asing di Kota Jambi.
  - b) Melaksanakan survey kelapangan Pada tanggal 21 Maret s.d 22 Maret 2018 oleh Tim Pemantauan Orang Asing Tingkat Kota

- Jambi ke PT. Mahad Al Mubarak Al Islami Litahfizhil, Universitas Batanghari, PT. DPS, PT. INOBAJA, PT. AHT GROUP AG.
- c) Rapat Tim Pemantauan Orang Asing tanggal 26 April 2018 bertempat di Aula Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Jambi berkoordinasi dengan Instansi terkait serta membahas masalah Orang Asing dan Tenaga Kerja Asing di Kota Jambi.
  - d) Rapat Tim Pemantauan Orang Asing tanggal 26 Juli 2018 bertempat di Aula Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Jambi membahas Koordinasi dan persiapan untuk melakukan Pemantauan Keberadaan Orang Asing dan Tenaga Kerja Asing di Kota Jambi.
  - e) Melaksanakan survey kelapangan pada tanggal 7 Agustus 2018 melaksanakan survey kelapangan oleh Tim Pemantauan Orang Asing Tingkat Kota Jambi ke Yayasan Bina Tunas Sejahtera, PT. Triveni, PT Lifeonic General Trading dan PT Bohai Driling.
  - f) Melaksanakan survey kelapangan pada tanggal 26 November 2018 oleh Tim Pemantauan Orang Asing Tingkat Kota Jambi ke Kementerian Riset dan Teknologi Unja Jambi, PT. DPS





- 2) Kegiatan Tim Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Kota Jambi bertujuan untuk deteksi dini masyarakat agar dapat terdeteksinya gejala-gejala gangguan keamanan di Kota Jambi untuk meminimalisir terjadinya gangguan keamanan yang terjadi baik itu bencana alam maupun bencana karena ulah manusia adapun Rapat Kegiatan Tim Forum Kewaspadaan dilaksanakan pada :
- a) Rapat Tim Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Kota Jambi dilaksanakan pada tanggal 27 Februari 2018 bertempat di Aula Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Jambi yang membahas program kerja Tim FKDM Kota Jambi dan masalah keamanan dan kenyamanan masyarakat di Kota Jambi.
  - b) Rapat Tim Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Kota Jambi dilaksanakan pada tanggal 11 Juli 2018 bertempat di Aula Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Jambi yang membahas isu dan informasi penting yang terjadi di Kota Jambi.
  - c) Rapat Tim Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Kota Jambi dilaksanakan pada tanggal 12 September 2018 bertempat di Aula Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Jambi yang membahas isu in-Stabilitas Keamanan Nasional dan isu kamtibmas di wilayah Kota Jambi, baik isu bidang ekonomi, politik hankam dan social serta berkoordinasi dengan kecamatan dalam wilayah Kota Jambi.
  - d) Rapat Tim Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Kota Jambi bersama unsur perwakilan pemerintah Kecamatan dalam lingkungan pemerintah Daerah Kota Jambi dilaksanakan pada

tanggal 10 Oktober 2018 bertempat di Aula Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Jambi yang membahas isu in-Stabilitas Keamanan Nasional dan isu lokal soal potensi ancaman dan gangguan Keamanan dan ketertiban Umum Masyarakat (Kamtibmas) di wilayah Kota Jambi.

- e) Rapat Tim Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Kota Jambi dilaksanakan pada tanggal 14 November 2018 bertempat di Aula Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Jambi yang membahas isu in-Stabilitas Keamanan Nasional dan isu lokal soal potensi ancaman dan gangguan Keamanan dan ketertiban Umum Masyarakat (Kamtibmas) di wilayah Kota Jambi serta mengevaluasi Tim FKDM Kota Jambi.



- 3) Kegiatan Tim Komunitas Intelijen Daerah Kota Jambi bertujuan untuk mendeteksi dini segala kemungkinan Ancaman, Gangguan, Hambatan dan Tantangan yang dapat memengaruhi stabilitas IPOLEKSOSBUDHANKAM di daerah Kota Jambi misalnya Ancaman Terorisme, Ekstrem Kanan, Ekstrem Kiri, Disintegrasi Bangsa, Isu SARA, Aliran Sesat, Perang antar suku / Agama dan masalah -

masalah sosial lainnya, dan dengan adanya deteksi dini maka diharapkan berbagai hal tersebut tidak terjadi. Adapun rapat Tim Komunitas Intelijen Daerah Kota Jambi dilaksanakan sebagai berikut :

- a) Rapat Tim Komunitas Intelijen Daerah Kota Jambi pada tanggal 11 Mei 2018 bertempat di ruang Badan Kesbangpol Kota Jambi menyambut bulan suci ramadhan.
- b) Rapat Tim Komunitas Intelijen Daerah Kota Jambi pada tanggal 29 Agustus 2018 bertempat di Aula Badan Kesbangpol Kota Jambi rapat membahas masalah Keberadaan Jemaah Ahmadiyah.
- c) Rapat Tim Komunitas Intelijen Daerah Kota Jambi pada tanggal 17 Oktober 2018 bertempat di Aula Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Jambi rapat membahas masalah Isu Aktual di Daerah Kota Jambi.
- d) Rapat Tim Komunitas Intelijen Daerah Kota Jambi pada tanggal 6 Desember 2018 bertempat di di Aula Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Jambi rapat persiapan dan antisipasi kerawanan Natal dan Tahun Baru serta evaluasi kinerja tahun 2018.





- 4) Kegiatan Tim Penanganan Konflik Sosial Tingkat Kota Jambi Untuk mencegah dan menghentikan berkembangnya konflik dan potensi konflik di daerah, Badan Kesbangpol Kota Jambi yang memiliki kewenangan mendukung terwujudnya stabilitas keamanan di daerah, dalam upaya pencegahan, penghentian dan pemulihan pasca konflik sosial. Dalam hal ini Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial melaksanakan Rencana Aksi Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tingkat Kota Jambi Tahun 2018 (Rencana Aksi Terlampir). Adapun kegiatan rapat Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tingkat Kota Jambi Tahun 2018 adalah sebagai berikut :
- a. Rapat Tim Penanganan Konflik Sosial Tingkat Kota Jambi pada tanggal 14 Februari 2018 bertempat di aula Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Jambi membahas pembentukan Rencana Aksi Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tingkat Kota Jambi Tahun 2018.
  - b. Rapat Kerja Tim Penanganan Konflik Sosial Tingkat Kota Jambi pada tanggal 24 April 2018 bertempat di aula Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Jambi membahas penyampaian laporan Rencana Aksi Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tingkat Kota Jambi Tahun 2018 untuk laporan B 04.
  - c. Rapat Kerja Tim Penanganan Konflik Sosial Tingkat Kota Jambi pada tanggal 17 Agustus 2018 bertempat di aula Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Jambi membahas penyampaian laporan

Rencana Aksi Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tingkat Kota Jambi Tahun 2018 untuk laporan B 08.



### **Sasaran 3.** Meningkatnya organisasi kemasyarakatan yang aktif

Badan Kesbangpol Kota Jambi menetapkan empat kriteria Organisasi Kemasyarakatan yang aktif, adapun kriteria tersebut sebagai wujud dalam mendukung program-program pemerintah. Kriteria Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) yang aktif, adalah sebagai berikut:

1. Memiliki Sekretariat Organisasi Kemasyarakatan;
2. Tersedianya Struktur Organisasi dan AD/ART;
3. Melaksanakan rapat rutin
4. Mengikuti kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah Kota Jambi;
5. Melaksanakan kegiatan di masyarakat

Adapun jumlah Organisasi Kemasyarakatan yang aktif hanya 15 dan 178 organisasi kemasyarakatan yang terdaftar.

Tabel jumlah organisasi kemasyarakatan

TAHUN	JUMLAH ORMAS TERDAFTAR	JUMLAH ORMAS AKTIF	%	PERBANDINGAN DENGAN KOTA LAIN
2014	164	1	0,6	n/a
2015	175	1	0,6	n/a

2016	182	3	1,6	n/a
2017	48	5	10,4	n/a
2018	178	15	8.43	n/a

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Jambi sebagaimana sesuai dengan Tupoksinya berperan untuk mendorong aktifnya organisasi kemasyarakatan, secara periodik atau continue, mengadakan:

- Sosialisasi Pendidikan Politik dan Wawasan Kebangsaan
- Silaturahmi dengan pengurus ormas
- Melakukan pembinaan-pembinaan melalui sosialisasi

Dari target yang ditetapkan yaitu 5%, realisasi 8.43% yang aktif. Hal ini disebabkan jumlah Ormas bertambah namun yang aktif hanya 15 Ormas. Organisasi Kemasyarakatan tersebut telah mendaftarkan ulang Organisasinya sesuai dengan Undang – undang Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Organisasi Kemasyarakatan. Organisasi Kemasyarakatan yang tidak aktif bukan berarti sudah bubar atau tidak punya kegiatan, namun hanya saja mungkin belum memahami tentang Undang – undang terbaru tersebut.



**Sasaran 4.** Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang politik terkait dengan kondisi daerah



Selama kegiatan berlangsung yang diselenggarakan oleh Badan Kesbangpol Kota Jambi selama tahun 2018, baik itu berupa sosialisasi peningkatan pendidikan politik bagi pemilih pemula di daerah Jambi maupun pemantauan situasi politik yang ada di daerah, dapat diketahui bahwa kegiatan tersebut berlangsung dengan baik dan dari hasil pemantauan di lapangan tentang situasi politik cukup kondusif dan aman. Beberapa kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai sasaran antara lain:

a. Sosialisasi Pendidikan Politik Bagi Pemilih Pemula

Pada tanggal 28 Februari 2018 bertempat di aula Bappeda Kota Jambi dilaksanakan Sosialisasi Pendidikan Politik bagi Pemilih Pemula dengan peserta sebanyak 120 orang peserta, narasumber dalam acara tersebut yaitu Wein Arifin (Ketua Komisioner KPU) dan Kaban Kesbangpol Kota Jambi dengan materi Peningkatan Partisipasi Pemilih Pemula dalam Pemilu serentak tahun 2018.

b. Pemantauan Perkembangan Situasi Politik

Pemantauan Perkembangan Situasi Politik di bentuk Tim Pemantauan Situasi Politik Kota Jambi, yang mana tugasnya memantau keadaan situasi politik dan kemudian dilaksanakan rapat-rapat untuk membahas masalah dan alternatif pemecahannya.

Tim tersebut terdiri dari unsur Pemerintah Kota Jambi, KPU Kota Jambi, Bawaslu Kota Jambi, Tokoh Pemerhati Politik Kota Jambi, Wartawan serta unsur lainnya yang berkompeten..

Rapat Pemantauan Situasi Politik tersebut dilakukan sebanyak 4 kali dalam satu tahun

- 1) Rapat Pertama Pemantauan Situasi Politik dilaksanakan pada tanggal 26 Februari 2018
- 2) Rapat Kedua Pemantauan Siuasi Politik dilaksanakan pada tanggal 1 Maret 2018
- 3) Rapat Ketiga Pemantauan Siuasi Politik dilaksanakan pada tanggal 28 Agustus 2018
- 4) Rapat Keempat Pemantauan Siuasi Politik dilaksanakan pada tanggal 10 Desember 2018



### c. Sosialisasi UU Pemilu

Pelaksanaan Sosialisasi UU Pemilu dilaksanakan di Aula Bappeda Kota Jambi pada tanggal 28 Maret 2018, adapun yang menjadi peserta dalam sosialisasi tersebut adalah Perwakilan Partai, Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat, LSM dan masyarakat yang jumlahnya 80 peserta.

Sebagai Narasumber dalam acara tersebut yaitu Drs. H. ANDI MUHAMMAD YUSUF, M.Si dan Komisioner KPU Kota Jambi



### 3.3. Akuntabilitas Keuangan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Jambi Tahun 2018 untuk belanja langsung sebesar Rp. 2.793.520.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 2.222.904.675,-, atau 78,46%. Untuk mendukung Sasaran Kinerja Badan Kesbangpol Kota Jambi dengan 2 Program total anggarannya sebesar Rp. 1.662.168.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 1.127.832.200 Atau sebesar 67.85 % dengan rincian sebagai berikut:

Sasaran	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)	Capaian Kinerja (%)	Efisiensi %
I	Terselesaikannya masalah keagamaan					
II	Menurunnya angka konflik di masyarakat					
	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	1.152.378.000	754.118.700	65.44	91	25.56
III	Meningkatnya organisasi kemasyarakatan yang aktif					
IV	Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang politik terkait dengan kondisi daerah					
	Program Pembinaan, Pemberdayaan dan Fasilitasi bagi Orkemas dan Parpol	509.790.000	373.713.500	73.31	84.19	10.88
V	Administrasi Umum	1.131.352.000	1.095.072.475	84.46	91.94	7.5

### 3.4. Hasil Review

Tabel Hasil Review

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2017		%	TAHUN 2018	%
			TARGET	REALISASI		TARGET	
1	Nilai AKIP	Nilai	75	69.74	5.3	80	
2	Persentase temuan BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti	%	100	100	0	100	

Dari Tabel diatas dapat dilihat bahwa nilai AKIP tidak mencapai nilai yang ditargetkan, dalam penyusunannya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik terus berusaha untuk memperbaiki dan melengkapi untuk semua kesempurnaan Laporan Kinerja pada Tahun berikutnya.



**BAB IV**

**PENUTUP**

Pada Sasaran Pertama yaitu terselesaikannya masalah agama dengan capaian kinerja 100%, hampir setiap masalah yang terkait dengan keagamaan selalu dengan segera diselesaikan agar tidak berkembang kemana-mana. Sampai hari ini kebanyakan masalah keagamaan adalah yang berkaitan dengan rumah ibadah.

Untuk Sasaran Kedua yaitu menurunnya angka konflik yang disebabkan suku, ras dan antar golongan/etnis. Pada sasaran kedua ini tercapai 100% karena pada tahun 2018 tidak satupun masalah yang terkait dengan konflik, konflik apa saja baik yang disebabkan oleh suku, ras, dan antar golongan/etnis tidak ada sama sekali

Sasaran Ketiga yaitu meningkatnya organisasi kemasyarakatan yang aktif. Hanya tercapai 10,4 persen dari target kinerja 5%, Jumlah Ormas yang terdaftar cukup banyak dan yang mendaftar ulang setiap tahunnya masih relatif sedikit. Kemungkinan besar Ormas ada yang melaksanakan kegiatannya tapi tidak melaporkan hasil kegiatannya kepada Badan Kesbangpol Kota Jambi

Sasaran terakhir atau Sasaran Keempat yaitu Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang politik terkait dengan kondisi daerah. Dapat dikatakan tercapai 100% kinerjanya, karena selama tahun 2018 situasi dan kondisi Kota Jambi sangatlah kondusif khususnya dilihat dari kondisi politik Kota Jambi.



## BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA JAMBI

Laporan Kinerja (LKj) 2018 semoga bisa bermanfaat khususnya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (BKBP) Kota Jambi. Supaya BKBP kedepan bisa meningkatkan kinerjanya lagi, dengan kata lain LKj merupakan acuan untuk bekerja lebih baik lagi dalam meningkatkan kinerja pegawai setiap saat.

Jambi, Januari 2019

**Kepala Badan Kesbangpol Kota Jambi**

**LIPHAN PASARIBU, SH**

Pembina Utama Muda

NIP. 19590912 198001 1 001